

ELASTISITAS DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN

KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh :

SITI NURHAYATI

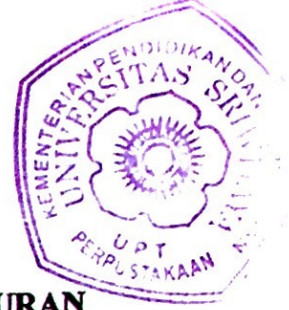
01081002024

EKONOMI PEMBANGUNAN

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelara Sarjana Ekonomi***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

S
336.240.7.
Sit
e
2012
C.121294.



ELASTISITAS DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN

KOTA PALEMBANG



Skripsi Oleh :

SITI NURHAYATI

01081002024

EKONOMI PEMBANGUNAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ELASTISITAS DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN

KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:


Nama : Siti Nurhayati
NIM : 01081002024
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan


Dosen Pembimbing
Ketua

Tanggal : 6 Juli 2012


Drs. Bambang B. Soebyakto, MA, Ph.D
NIP. 195306161980111004

Anggota

Tanggal : 6 Juli 2012


Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ELASTISITAS DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
KOTA PALEMBANG**

Disusun oleh:

Nama : Siti Nurhayati
NIM : 01081002024
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 24 Juli 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

**Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Juli 2012**

Ketua



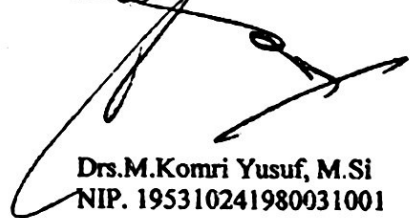
Drs. Bambang B. Soebyakto, MA, Ph.D
NIP. 195306161980111004

Anggota



Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

Anggota



Drs. M. Komri Yusuf, M.Si
NIP. 195310241980031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Nurhayati
NIM : 01081002024
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Elastisitas dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang

Pembimbing :

Ketua : Drs.Bambang Bemby Soebyakto, MA, Ph.D
Anggota : Anna Yulianita, SE, M.Si
Tanggal Ujian : 24 Juli 2012

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, Juli 2012

Pembuat Pernyataan,




Siti Nurhayati

01081002024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Elastisitas dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai kepekaan perubahan pajak hiburan jika terjadi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah seiring dengan berkembangnya tempat-tempat hiburan di Kota Palembang secara pesat dan seberapa besar tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan
3. Sekretaris Jurusan
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, Juli 2012

Penulis

ABSTRAK

ELASTISITAS DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN KOTA PALEMBANG

Oleh:

Siti Nurhayati

Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak daerah Kota Palembang yang memiliki andil yang cukup besar sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya elastisitas pajak hiburan Kota Palembang dan menganalisis besarnya tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga belas tahun (Tahun 1997 sampai 2010) pajak hiburan Kota Palembang bersifat inelastis atau perubahan satu persen Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan penurunan realisasi pajak hiburan Kota Palembang. Hal ini berarti bahwa perubahan penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang belum memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Palembang adalah efektif yang berarti bahwa pajak hiburan Kota Palembang mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang khususnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Kata kunci : *Pajak Hiburan, Potensi Penerimaan Pajak Hiburan, Elastisitas Pajak Hiburan, Efektivitas Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

THE ELASTICITY AND THE EFFECTIVENESS OF ENTERTAINMENT TAX REVENUE OF PALEMBANG

by :

Siti Nurhayati

Drs. Bambang Bemby Soebyakto, MA, Ph.D; Anna Yulianita, SE, M.Si.

This study aims to analyze the magnitude of the elasticity and the effectiveness of the entertainment tax in the city of Palembang. Entertainment tax is a local tax city of Palembang that has a great contribution as a source of local revenue or local revenue (PAD). The results of this study show that during the period of thirteen years (1997 to 2010) Palembang entertainment tax is inelastic or one percent change in local revenue realization lead to lower entertainment tax Palembang. This means that changes in Palembang Entertainment Tax have not given a great contribution to the increase in Revenue of Palembang. This study also shows that the effectiveness of the entertainment tax Palembang city was effective. Meaning the entertainment tax of Palembang achieved the targets set by the government, the city of Palembang, especially Palembang Regional Revenue Office.

Keywords: *Entertainment Tax, Entertainment Tax Revenue Potential, Elasticity of Entertainment Tax Effectiveness and Revenue*



Diterjemahkan sesuai dengan aslinya,
Palembang, 1 Agustus 2012
Kepala Lab. Bahasa Program Pascasarjana Unsri

Drs. Musih Hambali, MLIS
NIP. 19578261984031001

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Siti Nurhayati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Mariana/ 13 Januari 1989
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah (Orangtua) : Jalan Sabar Jaya NO.3 RT.01 Mariana
Alamat Email : smilez_aya@yahoo.co.id

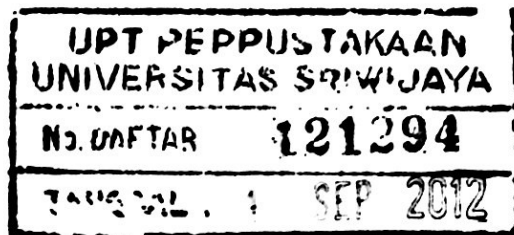
Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SD Tamansiswa I Sungai Gerong (1995-2001)
SMP : SMP YKPP III Sungai Gerong (2001-2004)
SMA : SMA Negeri 4 Palembang (2004-2007)

Pendidikan Non Formal : Les bahasa Inggris di Lembaga Bahasa Universitas
Sriwijaya (2009-2010)

Pengalaman Organisasi : -

Penghargaan Prestasi : Enumerator di Bank Indonesia Palembang dalam
Survei Pemantauan Harga di Palembang periode
Juli s.d September 2011



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian	12
1.4.Manfaat Peneltian	12
1.5.Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Landasan Teori	
2.1.1. Pajak Daerah	14
2.1.1.1. Jenis Pajak Daerah	15
2.1.1.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.....	18
2.1.1.3. Objek dan Tarif Pajak Daerah.....	20
2.1.1.4. Cara Pemungutan Pajak	22
2.1.1.5. Tolok Ukur Potensi Pajak Daerah.....	23
2.1.2. Pajak Hiburan.....	24
2.1.2.1. Pengertian Pajak Hiburan.....	24

2.1.2.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan.....	25
2.1.2.3. Objek Pajak Hiburan	25
2.1.2.4. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	26
2.1.2.5. Tarif Pajak Hiburan.....	26
2.1.1. Konsep Elastisitas	28
2.1.3.1. Elastisitas Pendapatan (<i>Income Elasticity</i>).....	29
2.1.3.2. Elastisitas Silang (<i>Cross Elasticity</i>)	30
2.1.2. Konsep Efektivitas Pajak	31
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32
2.1.5.1. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah.....	35
2.1.5.2. Peranan Pendapatan Asli Daerah	36
2.1.5.3 Hubungan PAD dengan Pajak Hiburan.....	37
2.2. Penelitian Sebelumnya	37
2.3. Kerangka Pemikiran	40
2.4. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	43
3.2. Rancangan Penelitian	43
3.3. Sumber Data	44
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	44
3.5. Teknik Analisis	45
3.5.1. Analisis Elastisitas.....	45
3.5.2. Analisis Efektivitas	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	
4.1.1. Perkembangan PAD Kota Palembang	48
4.1.2. Perkembangan Pajak Daerah Kota Palembang	52
4.1.3. Perkembangan Pajak Hiburan Kota Palembang.....	53
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Analisis Elastisitas Pajak Hiburan Kota Palembang.....	56
4.2.2. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan Kota Palembang.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
5.3 Keterbatasan Penelitian	69
Daftar Pustaka	70
Lampiran-lampiran	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Wajib Pajak/Objek Pajak Daerah Kota Palembang	3
Tabel 3.5.1 Koefisien Elastisitas	45
Tabel 3.5.2 Ukuran Tingkat Efektivitas	46
Tabel 4.1 Perkembangan PAD Kota Palembang	49
Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	53
Tabel 4.3 Pertumbuhan Pajak Hiburan dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Palembang	55
Tabel 4.4 Koefisien Elastisitas	56
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Elastisitas Pajak Hiburan.....	57
Tabel 4.6 Ukuran Tingkat Efektivitas	62
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Hiburan Menurut Jenisnya.....	7
Gambar 1.2 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan.....	10
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1 Pertumbuhan PAD Kota Palembang	51
Gambar 4.2 Elastisitas Pajak Hiburan Kota Palembang	61
Gambar 4.3 Efektivitas Pajak Hiburan Kota Palembang	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Penerimaan Pajak Hiburan Menurut Jenisnya	73
Lampiran 2 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang	74
Lampiran 3 Perhitungan Elastisitas Pajak Hiburan Kota Palembang	75
Lampiran 4 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan Kota Palembang	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus-menerus melakukan pembangunan nasional untuk mencapai tujuannya yaitu peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Agar terwujudnya pembangunan nasional tersebut maka digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan pemerintah yaitu berasal dari pungutan pajak.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan

prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur (Wachdin, 2010: 2).

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Yani, 2008: 53). Pungutan pajak daerah diatur dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah ini diharapkan dapat menyokong pembangunan daerah dan dapat memenuhi pembiayaan kebutuhan dan urusan sendiri.

Kota Palembang adalah salah satu kota metropolitan yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Sejalan dengan hal itu, aktivitas dan kegiatan masyarakat pun mengalami peningkatan. Hal itu juga merupakan salah satu faktor penting yang mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pajak di Kota Palembang salah satunya penerimaan pajak hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga (Yani, 2008: 55).

Kota Palembang sebagai daerah yang kaya akan keanekaragaman penduduk dengan beragam aktivitas dan kesibukan-kesibukan yang berbeda. Sehingga tidak mengherankan jika terjadinya peningkatan tempat-tempat hiburan karena banyaknya warga masyarakat yang membutuhkan. Dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan. Di bawah ini adalah data wajib pajak/objek pajak daerah tahun 2007-2010 :

**Tabel 1.1 Data Wajib Pajak/Objek Pajak Daerah (Perusahaan)
Kota Palembang Tahun 2007 - 2010**

No.	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak/Objek Pajak			
		2007	2008	2009	2010
1.	Pajak Hotel	104	127	159	146
2.	Pajak Restoran	658	732	718	751
3.	Pajak Hiburan	105	106	123	138
4.	Pajak Reklame	303	325	315	410
5.	Pajak Penerangan Jalan	271.024	271.022	295.890	296.140
6.	Pajak Bahan Galian Golongan C	788	338	46	42
7.	Pajak Parkir	106	128	153	135
Jumlah		272.613	272.140	297.404	297.762

Sumber: <http://dispenda.palembang.go.id> diakses pada 8 Maret 2012

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, wajib pajak/objek pajak daerah meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2007 objek pada pajak hotel sebanyak 104 hotel, terjadi peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2008 sebesar 127 hotel, peningkatan juga masih ditunjukkan pada tahun 2009 dengan objek pajak hotel

sebanyak 159 hotel, peningkatan ini terjadi karena banyaknya hotel-hotel baru yang dibangun baik hotel besar maupun hotel kelas melati, namun pada tahun 2010 objek pajak hotel tercatat mengalami penurunan yaitu 146 hotel. Peningkatan juga terjadi pada objek pajak restoran pada tahun 2007 ada 658 objek pajak restoran. Begitu pula terjadi peningkatan pada tahun 2008 dengan bertambahnya 74 objek pajak restoran. Jadi pada tahun 2008 objek pajak restoran sebesar 732 restoran. Berbeda dengan objek pajak hotel, penurunan terjadi pada tahun 2009 pada objek pajak restoran, sehingga pada tahun 2009 objek pajak restoran tercatat ada 718 objek pajak restoran. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2010 tercatat 751 objek pajak restoran.

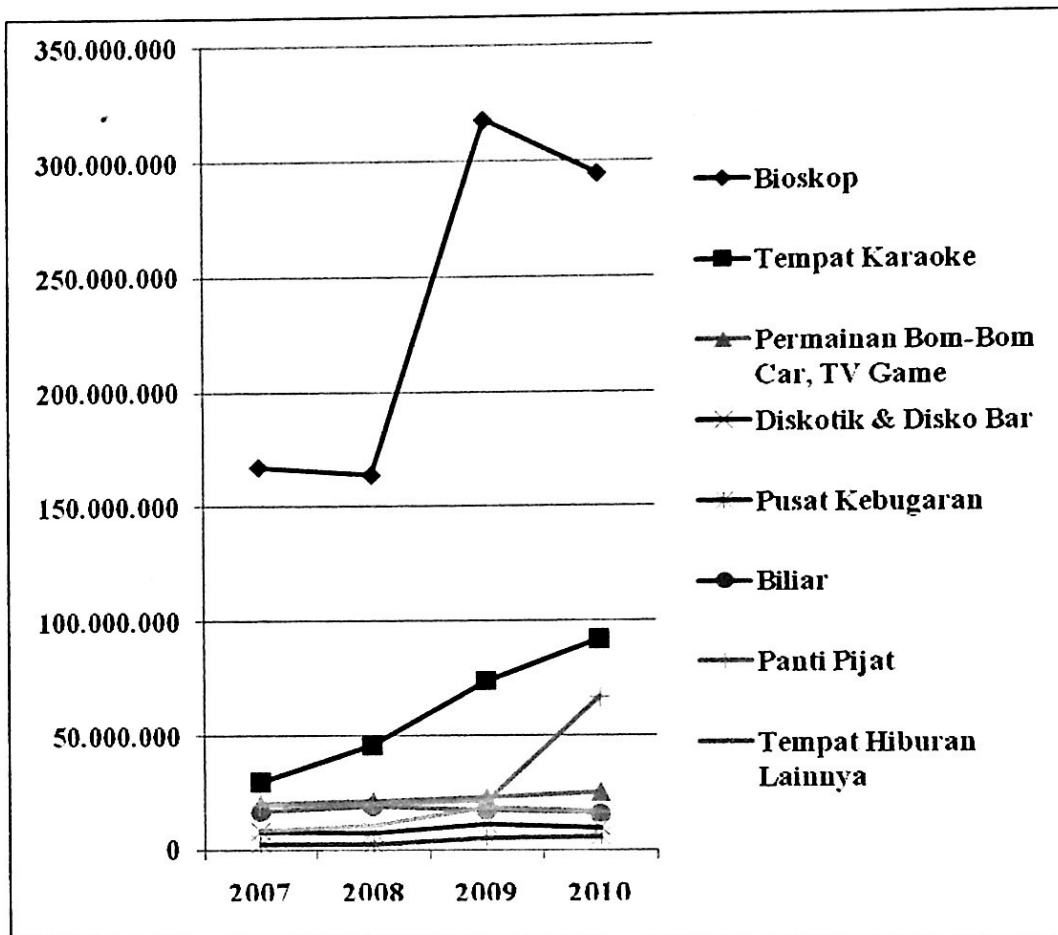
Pada objek pajak hiburan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ditunjukkan pada tahun 2007 tercatat 105 objek pajak hiburan, tahun 2008 objek pajak hiburan sebesar 106, peningkatan objek pajak hiburan tahun 2009 yang ditunjukkan dengan bertambahnya 17 objek pajak hiburan. Jadi pada tahun 2009 ada 123 objek pajak hiburan. Peningkatan terus terjadi di tahun 2010 objek pajak hiburan sebesar 138 objek pajak hiburan. Dengan peningkatan yang terus terjadi pada objek pajak hiburan Kota Palembang, ini berarti masyarakat Kota Palembang banyak yang membuka tempat-tempat hiburan baru, seperti permainan rental *Play Station* (PS), *game online*, SPA, tempat hiburan lain seperti tempat pemancingan, *water fun*, dan *water park*.

Objek pajak reklame tahun 2007 ada 303 objek pajak reklame, tahun 2008 tercatat 325 objek pajak reklame. Namun penurunan terjadi tahun 2009 yaitu sebanyak 10 objek pajak reklame. Ini disebabkan karena faktor beberapa titik reklame tidak diperbolehkan lagi untuk dipasang reklame. Jadi pada tahun 2009 ada 315 objek pajak reklame. Peningkatan kembali terjadi tahun 2010, tercatat ada 410 objek pajak reklame. Begitu pula pada objek pajak penerangan jalan pada tahun 2007 ada 271.024, tahun 2008 tercatat 271.022 objek pajak penerangan, tahun 2009 ada 295.890 objek pajak penerangan dan peningkatan tetap terjadi pada tahun 2010 dengan 296.140 objek pajak penerangan jalan. Pada tahun 2007, objek pajak bahan galian golongan C sebanyak 788, tahun 2008 sebanyak 338 objek pajak bahan galian golongan C, dan pada tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan yang sangat drastis pada objek pajak tersebut, ini dikarenakan objek pajak bahan galian golongan C Kota Palembang tergantung pada proyek pembangunan daerah, terjadinya penurunan pada proyek tambang ini merupakan faktor penurunan objek pajak bahan galian golongan C pada tahun 2009 dan 2010.

Pada objek pajak parkir tahun 2007 sebanyak 106 objek, terjadi kenaikan pada tahun 2008 ada 128 objek pajak parkir, 153 objek pajak parkir pada tahun 2009 dan tahun 2010 ada 135 objek pajak parkir. Secara total objek pajak daerah Kota Palembang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat 272.613 objek pajak daerah, tahun 2008 sebesar 272.410 objek pajak daerah, tahun 2009 ada 297.404 objek pajak daerah dan peningkatan juga terjadi pada tahun 2010 sebesar 297.762 objek pajak daerah.

Kota Palembang adalah salah satu kota di Indonesia yang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Seiring dengan perkembangan itu, Palembang melakukan pembangunan kota secara besar-besaran terhadap fasilitas publik seperti perbaikan dan pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur kota, termasuk peningkatan tempat-tempat hiburan untuk meningkatkan para wisatawan berkunjung ke Palembang, hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berkembangnya tempat-tempat hiburan baik itu yang dikelola oleh pihak swasta, hotel, maupun secara pribadi menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap penerimaan pajak hiburan sesuai dengan jenis dan pelayanan yang disediakan oleh tempat hiburan tersebut.

Kota Palembang memiliki berbagai jenis tempat hiburan, diantaranya adalah bioskop, tempat karaoke, permainan bom-bom car, bilyard, pusat kebugaran, diskotik dan disko, panti pijat dan tempat hiburan lainnya. Seiring dengan meningkatnya wajib pajak/objek pajak maka terjadi peningkatan pula terhadap penerimaan pajak hiburan. Berikut ini adalah trend jenis-jenis pajak hiburan yang ada di Kota Palembang 2007-2010 :



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007-2010

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Hiburan Menurut Jenisnya Tahun 2007-2010 (Rupiah)

Gambar 1.1 mempunyai trend yang menggambarkan bahwa terjadinya peningkatan penerimaan pajak hiburan pada masing-masing tempat hiburan. Penerimaan pajak tempat hiburan bioskop mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2007 penerimaan pajak bioskop sebesar Rp. 167.720.000, penurunan terjadi tahun 2008, sehingga penerimaan pajak bioskop sebesar Rp. 164.144.250. Banyaknya film yang berkualitas menyebabkan penonton meningkat

sehingga pada tahun 2009 penerimaan pajak hiburan bioskop meningkat sebesar Rp. 317.991.000. Namun tahun 2010 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 294.771.000. Hal ini terjadi karena adanya salah satu bioskop Palembang yang ditutup karena berkurangnya pengunjung bioskop tersebut.

Peningkatan selalu terjadi setiap tahun pada tempat karaoke. Penerimaan pajak tempat karaoke tahun 2007 sebesar Rp. 29.886.985, tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 46.032.160 terus mengalami peningkatan tahun 2009 sebesar Rp. 74.137.725 dan tahun 2010 penerimaan pajak tempat karaoke sebesar Rp. 92.286.045. Peningkatan ini disebabkan selalu bertambahnya peminat/pengunjung tempat karaoke sehingga banyaknya dibangun tempat-tempat karaoke baru. Sama halnya seperti tempat karaoke, Permainan Bom-Bom Car dan TV Game juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 penerimaan pajak hiburan pada permainan bom-bom Car dan TV game sebesar Rp. 20.299.350. Tahun 2008 sebesar Rp. 21.346.300, tahun 2009 sebesar Rp. 22.874.000 dan tahun 2010 sebesar Rp. 25.399.450. Banyaknya peminat permainan bom-bom car dan TV game ini yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada penerimaan tempat hiburan ini.

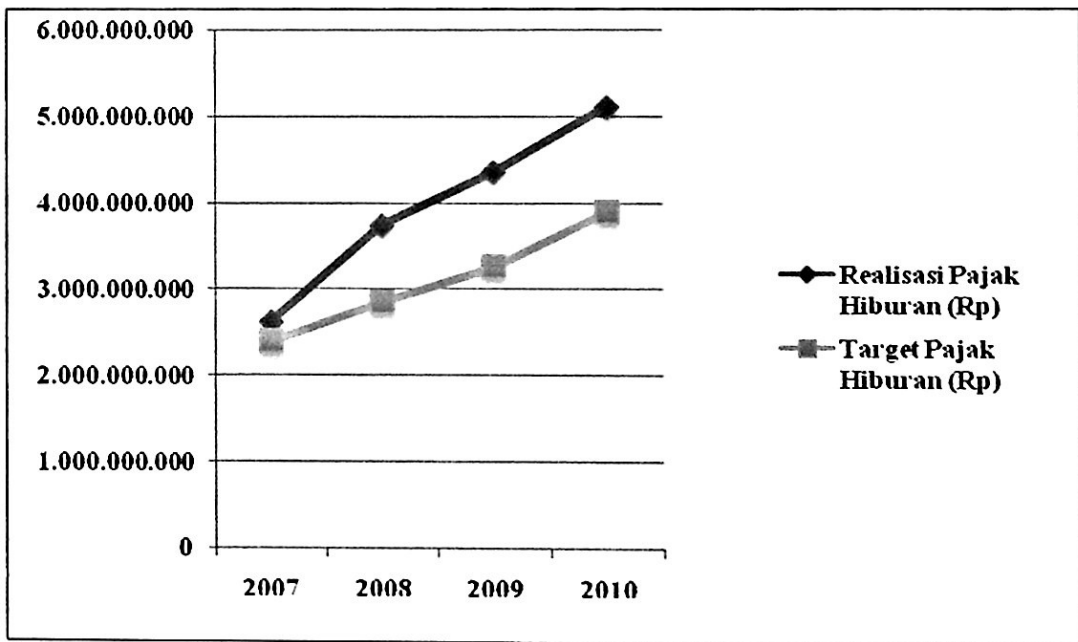
Peningkatan penerimaan yang setiap tahunnya juga terjadi pada tempat kebugaran dan panti pijat. Tahun 2007 penerimaan pajak pada pusat kebugaran sebesar Rp. 2.755.000, tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 2.954.000, tahun 2009 sebesar Rp. 5.402.000 dan tahun 2010 sebesar Rp. 6.095.000. Begitu pula dengan

penerimaan pajak panti pijat tahun 2007 adalah Rp. 19.715.000, tahun 2008 penerimaan pajak panti pijat sebesar Rp. 20.545.000, tahun 2009 sebesar Rp. 21.125.000 dan tahun 2010 penerimaan pajak sebesar Rp. 66.867.713. Peningkatan penerimaan pajak baik pada pusat kebugaran maupun pada panti pijat dikarenakan bertambahnya peminat tempat tersebut, sehingga dengan bertambahnya peminat menyebabkan bertambah pula tempat-tempat baru yang dibuka untuk pusat kebugaran dan panti pijat.

Penerimaan pajak pada tempat hiburan diskotik dan disko bar, dan tempat hiburan lainnya seperti tempat pemancingan, salon dan spa perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2007 penerimaan pajak pada diskotik dan disko bar sebesar Rp. 8.100.000, tahun 2008 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 7.749.000, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2009 sebesar Rp. 11.300.000 dan tahun 2010 penerimaan pajak diskotik dan disko bar mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 9.750.895. Begitu pula pada penerimaan pajak hiburan tempat hiburan lainnya. Tahun 2007 penerimaan pajak sebesar Rp. 8.811.921, tahun 2008 sebesar Rp. 10.785.376, tahun 2009 yaitu Rp. 18.868.080 dan tahun 2010 sebesar Rp. 16.914.700. Penerimaan pajak hiburan pada tempat biliar cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 penerimaan pajak biliar adalah Rp. 16.541.599, tahun 2008 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 19.030.550, tahun 2009 mulai mengalami penurunan sebesar Rp. 17.116.240 dan tahun 2010 sebesar Rp. 16.226.800. Penurunan ini dapat disebabkan tempat

hiburan biliar tersebut kehilangan peminat/pengunjung sehingga penerimaan tempat hiburan tersebut ikut mengalami penurunan.

Dari hasil pengamatan di lapangan, tempat-tempat hiburan Kota Palembang terus-menerus mengalami peningkatan namun sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup kecil. Padahal pajak hiburan memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan perkembangan Kota Palembang. Di bawah ini grafik perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak hiburan tahun 2007-2010:



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2007-2010

Gambar 1.2 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang Tahun 2007-2010

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, proporsi realisasi terhadap target terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 133,52 persen. Kemudian pada tahun 2008 sebesar 131,57 persen, tahun 2010 sebesar 131,11 persen dan tahun 2007 sebesar 109,37 persen. Terlihat bahwa proporsi realisasi terhadap target memiliki angka rata-rata yang lebih besar dari 100% yang berarti bahwa realisasi yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Untuk tahun-tahun selanjutnya besarnya target terhadap realisasi selalu lebih kecil sehingga proporsi yang terjadi selalu di atas 100%. Ini bisa terjadi karena penentuan target yang hanya selalu berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalu bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hiburan yang lebih besar. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi yang cukup besar. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hiburan sangat besar, yang belum digali optimal dalam pelaksanaannya (Rahayu, 2011).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis tentang pajak hiburan yang membahas tentang besarnya elastisitas dan efektivitas pajak hiburan Kota Palembang, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata. Maka penulis mengambil judul penelitian “Elastisitas dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Berapa besar elastisitas penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pajak hiburan yang ada di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis besarnya elastisitas pajak hiburan Kota Palembang.
2. Menganalisis besarnya tingkat efektivitas pajak hiburan di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung yang teori-teori yang digunakan, seperti teori Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Elastisitas dan Efektivitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan dapat dipakai sebagai kajian bagi Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PENELITIAN

Menguraikan landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan mencoba menarik suatu hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Yurni. 2009. "Kinerja Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Metro". *Jurnal Ilmiah ESAI*. Volume 3, Edisi Khusus Dies Natalis Polinela, April 2009. Lampung. *ISSN No.1978-6034*.
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. 1998-2010. *Daftar Realisasi Penerimaan Daerah Kota Palembang*. Palembang: Dispenda.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul, dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lumbanbatu, Dorro. 2007. *Elastisitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang*. Skripsi, tidak dipublikasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1995. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mannan, Abdul. 2004. *Analisis Kinerja Pajak Daerah DKI Jakarta*. Tesis, Universitas Borobudur, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mudrajad, Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan (edisi 6)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Novalita, Betta Sari. 2005. "Peranan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor". *Artikel Ekonomi. Nomor 20200310*.

- Novrianto, Harvi. 2007. *Evaluasi Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri)*, Malang, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Diambil pada tanggal 7 Maret 2012 pukul 10:15 WIB dari <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/211/jiptummpp-gdl-s1-2007-harvinovir-10539-Pendahul-n.pdf>.
- Nugraha & Arvian Triantoro. 2004. Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 4. No 1: 379-388.
- Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- Rahardja, Prathama, dan Mandala Manurung. 2001. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahayu, Betty. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten GunungKidul*, Semarang, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Diambil pada tanggal 10 Maret 2012 Pukul 10.00 WIB dari <http://eprints.undip.ac.id/29396/1/Skripsi002.pdf>.
- Rosmeli. 2010. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah (Dilihat dari sisi PAD terhadap PDRB) Provinsi Jambi Tahun 2000-2008". *Jurnal Ekonomi*. Volume 111. Edisi April 2010. ISSN: 0854-8986.
- Sari, Yulia Anggara. 2010. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung". Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja*. Volume 13. No 2. November 2010. 173-185.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, Bambang. 2006. *Elastisitas Pajak Daerah dalam Menunjang Otonomi Daerah Kota Palembang*. Skripsi, tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
- Sudarman, Ari. 2000. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Suharyadi dan Purwanto S.K. 2008. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 1995. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suparmoko, M.. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Susilo. 2000. "Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan ZOPP". *Bulletin Lintas Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Undang-Undang Nomor No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wachdin, Faizah. 2010. *Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Jawa Timur. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran". Diambil pada tanggal 10 Maret 2012 pukul 10:21 WIB dari http://eprints.upnjatim.ac.id/532/1/file_1.pdf.
- Wahyuni, Chicitri. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hiburan Kota Palembang*. Skripsi, tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.